PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA SEPEDA MOTOR

Oleh :

Dewa Putu Tagel
Ni Ketut Sri Ratmini
I Made Yudi Asmara

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya, mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Satlantas Polres Badung, tingkat pelanggaran lalu lintas para pelajar atau anak di bawah umur 16 tahun di kabupaten Badung relatif tinggi sepanjang tahun 2015. Dari total 8.720 pelanggaran, sebanyak 1.612 kasus dilakukan oleh para pelajar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum terhadap anak pengguna sepeda motor yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan memberi sanksi berupa sanksi tilang masih kurang optimal diterapkan, karena masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pengguna sepeda motor setiap tahunnya. kurangnya sarana atau fasilitas membuat anak menggunakan sepeda motor kesekolah, seperti tidak adanya angkutan umum yang di gunakan anak untuk menumpang kesekolah, sehingga anak menggunakan sepeda motor sendiri untuk pergi ke sekolah.

Kata kunci : Penegak Hukum, Anak pengguna sepeda motor.

I. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (C. S. T. Kansil, 1995 : 58).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah terisolir tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor.

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan.

Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa “pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam bab VIII, yaitu Pasal 77. Pada pasal 80, bab VIII mengatur mengenai penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D. Persyaratan pemohon SIM perseorangan diatur dalam bab VIII, pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik,

kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan kesabaran. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relative pendek. Mengenai aparat penegak hukum Soerjono Soekanto (1989 : 58) menyatakan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politietoezicht*) dan sebagai penindak (*politiedwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi). Pada jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak-anak. Tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah, berdasarkan data Satlantas Polres Badung di kutip dari Tribun Bali (2016) menyatakan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas para pelajar atau anak di bawah umur 16 tahun di kabupaten Badung relatif tinggi sepanjang tahun 2015. Dari total 8.720 pelanggaran, sebanyak 1.612 kasus dilakukan oleh para pelajar. Selain belum mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) mereka juga kerap tidak

mengenakan helm saat berkendara. (Tribun Bali. (2016). *1.612 PelanggaranLalu Lintas di Badung Dilakukan oleh Pelajar*. [Online]. Diakses dari <http://bali.tribunnews.com/2016/01/07/1612pelanggaran-lalu-lintas-di-badung-dilakukan-oleh-pelajar>).

Tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Badung cukup tinggi, hal ini dapat dilihat berdasarkan data dalam tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Usia Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Usia Pelanggar		
		0-15 tahun	16-20 tahun	<17 tahun
1	2015	157	1474	-
2	2016	427	2266	-
3	2017	794	1753	-
4	2018	-	-	2127

(Sumber : Unit Turjawali Satlantas Polres Badung)

Berdasarkan data jumlah pelanggaran lalu lintas berdasarkan usia Satlantas Polres Badung tahun 2015, tingkat pelanggaran anak pengguna sepeda motor usia dibawah 17 tahun sesuai dengan batas usia yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak pengguna sepeda motor usia 0-15 tahun mencapai 157 pelanggaran dan usia 16-20 tahun mencapai 1.474 pelanggaran. Pada tahun 2016 jumlah pelanggaran mengalami peningkatan, pelanggaran yang dilakukan oleh anak pengguna sepeda motor usia 0-15 tahun mencapai 427 pelanggaran dan usia 16-20 tahun mencapai 2.266 pelanggaran. Pada tahun 2017, pelanggaran yang dilakukan oleh anak pengguna sepeda motor usia 0-15 tahun mencapai 794 pelanggaran jumlahnya lebih tinggi dari tahun 2015 dan 2016, pada usia 16-20 tahun tingkat pelanggaran mencapai 1.753 pelanggaran. Pada tahun 2018, pelanggaran yang dilakukan oleh anak pengguna sepeda motor usia dibawah 17 tahun mencapai 2.127 pelanggaran. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat dari sepanjang tahun

2015 sampai dengan tahun 2018 tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anak pengguna sepeda motor yang usianya dibawah 17 tahun, jumlahnya meningkat setiap tahunnya.

Dari data tersebut dapat dilihat masih tingginya jumlah anak pengguna motor yang melanggar lalu lintas. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa kendaraan kesekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

II. PEMBAHASAN

2.1 Peraturan Lalu Lintas

Peraturan digunakan untuk mentertibkan semua masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri, jadi dibuatlah sebuah peraturan yg mengikat mereka agar mematuhi. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya”. Dalam hal ini peraturan lalu lintas digunakan untuk menertibkan para pengguna kendaraan, untuk mentaati peraturan lalu lintas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat berkendara.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas (dalam Dewa Putu Tagel, 2013, hlm. 32), antara lain :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840).
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020).
 6. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12/M-IND/PER/3/2006 dan Nomor : 07/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 595/MPP/Kep/9/2004 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) Ban Secara Wajib.
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 40/MIND/ PER/4/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 120/MIND/ PER/11/2010 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L Secara Wajib.
- Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa (mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya). Hukum positif tersebut mengikat dan mempunyai wewenang sah yaitu negara dan hukum tersebut dijalankan oleh lembaga yang diakui masyarakat sebagai lembaga pelaksana peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh pengguna jalan.
- Tujuan diselenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :
- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
 - b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 - c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat
- Dari tujuan diselenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat menciptakan ketertiban, kelancaran dan keamanan pengguna jalan. Selain itu juga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika berkendara seperti kecelakaan,
- Aturan lalu lintas yang perlu diketahui dan ditaati oleh masyarakat pengguna jalan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas, di atur dalam pasal 105 dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Oleh karena itu, Batasan umur anak pengguna sepeda motor yang dapat ditegakan hukuman dalam penelitian ini adalah anak pengguna sepeda motor yang berumur di bawah 17 tahun. Karena menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal 81 ayat (2) persyaratan untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi C (SIM C) adalah 17 tahun, berarti anak yang umurnya di bawah 17 tahun tidak boleh menggunakan sepeda motor. Tetapi banyak anak di bawah umur 17 tahun menggunakan sepeda motor dengan alasan tidak ada yang mengantar masuk pulang sekolah karena orang tua bekerja, tidak adanya angkutan umum yang lewat ke tempat si anak tinggal untuk numpang ke sekolah, dan ada yang mengikuti temanya karena banyak teman yang menggunakan sepeda motor kesekolah jadi si anak ikut menggunakan sepeda motor ke sekolah.

2.2 Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1983 : 35), penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya

mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan, disamping membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh aparat penegak maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peraturan yang ditopang pengawasan oleh pihak yang berwenang akan menimbulkan kapatuhan yang lebih baik dibandingkan dengan aturan yang dikomunikasikan namun dibiarkan tanpa terkontrol. Penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepolisian, khususnya polisi yang menangani bidang lalu lintas.

Pasal 5 angka (3) huruf (e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa : “urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan Pasal tersebut, maka urusan penegakan hukum dalam hal ini penegakan terhadap anak pengguna sepeda motor merupakan tugas dari Kepolisian (Dewa Putu Tagel, 2013). Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap anak pengguna sepeda motor yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan memberi sanksi berupa sanksi tilang terhadap anak pengguna sepeda motor masih kurang optimal diterapkan, karena masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pengguna sepeda motor sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

2.3 Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan hukum tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, sebagai

contoh bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan peralatan yang kurang memadai, jika peralatan dimaksud sudah ada, maka faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai, karena sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian kurangnya sarana atau fasilitas membuat anak menggunakan sepeda motor kesekolah, seperti tidak adanya angkutan umum yang di gunakan anak untuk menumpang kesekolah, sehingga anak menggunakan sepeda motor sendiri untuk pergi ke sekolah.

2.4 Budaya Hukum

Menurut Bernard Arief Sidharta (1999 : 76) bahwa, “budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintahan terhadap atau berkenaan dengan hukum”.

Budaya hukum merupakan sikap perilaku manusia, kebiasaan-kebiasaan yang dapat membentuk kekuatan-kekuatan sosial untuk mentaati hukum atau sebaliknya melanggar hukum. Budaya hukum bagian dari budaya pada umumnya, berupa adat istiadat, pandangan, cara berpikir dan bertingkah laku, semuanya itu dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dan cara-cara tertentu. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Lawrence M. Friedman (dalam Zen Hadiano, 2014) bahwa *“Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways”*. Artinya budaya hukum adalah bentuk perilaku masyarakat bagaimana hukum digunakan, dipatuhi dan ditaati.

Mengenai budaya hukum anak pengguna sepeda motor terhadap pelaksanaan aturan di

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan 3 (tiga) anak pengguna sepeda motor adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui

Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan hukum, mengetahui suatu keberadaan hukum merupakan sesuatu yang penting, sehingga dalam penerapannya di masyarakat dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan perundang-undangan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil wawancara dengan 3 (tiga) anak pengguna sepeda motor mengetahui bahwa orang yang boleh menggunakan sepeda motor adalah orang yang sudah mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan sudah cukup umur, Akan tetapi ketiga anak pengguna sepeda motor tidak mengetahui tentang aturan lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Memahami

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Memahami suatu perundang-undangan menjadi sesuatu kewajiban bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil wawancara dengan 3 (tiga) anak pengguna sepeda motor tidak memahami aturan lalu lintas secara mendalam, tetapi ketiga anak pengguna sepeda motor hanya mengetahui aturan lalu lintas jika menggunakan sepeda motor harus menggunakan helm. Akan tetapi, walaupun sudah mengetahui menggunakan sepeda motor harus menggunakan helm, ketiga anak pengguna sepeda motor tidak menggunakan helm saat menggunakan sepeda motor ke sekolah, dengan alasan rumahnya dekat dengan sekolah dan tidak melewati jalan raya.

3. Mentaati

Setelah mengetahui dan memahami, masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam berperilaku. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dalam mendukung maksud dan tujuan dari perundang-undangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil wawancara dengan 3 (tiga) anak pengguna sepeda motor tidak mentaati aturan yang ada, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena ketiga anak pengguna sepeda motor melanggar aturan yang ada, seperti menggunakan sepeda motor tetapi belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau belum cukup umur dan sekaligus tidak menggunakan helm saat menggunakan sepeda motor.

Selain itu, orang tua terlalu membebaskan anaknya untuk menggunakan sepeda motor, pengaruh lingkungan tempat tinggal dan pergaulan anak di lingkungan rumah merupakan faktor-faktor yang membuat anak menggunakan motor ke sekolah ataupun untuk keseharian anak.

III. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut, Batasan umur anak pengguna sepeda motor yang dapat ditegakan hukuman dalam penelitian ini adalah anak pengguna sepeda motor yang berumur di bawah 17 tahun. Karena menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal 81 ayat (2) persyaratan untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi C (SIM C) adalah 17 tahun, berarti anak yang umurnya di bawah 17 tahun tidak boleh menggunakan sepeda motor. penegakan hukum terhadap anak pengguna sepeda motor yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan memberi sanksi berupa sanksi tilang terhadap anak pengguna sepeda motor masih kurang optimal diterapkan, karena masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pengguna sepeda motor sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kurangnya sarana atau

fasilitas membuat anak menggunakan sepeda motor kesekolah, seperti tidak adanya angkutan umum yang di gunakan oleh anak untuk menumpang kesekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- C. S. T. Kansil. (1995). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sidharta, Bernard Arief. (1999). *Refleksi Tentang Struktur Hukum Sebuah Penelitian Tentang Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Soerjono, Soekanto. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (1989). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Jurnal

- Tagel, Dewa Putu. (2013). *Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar*. Universitas Udayana Denpasar. [Online]. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/44216-ID-kesadaran-hukum-masyarakat-pengguna-jalan-di-kota-denpasar.pdf>

Artikel Online

- Tribun Bali. (2016). *1.612 Pelanggaran Lalu Lintas di Badung Dilakukan oleh Pelajar*. [Online]. Diakses dari <http://bali.tribunnews.com/2016/01/07/1612pelanggaran-lalu-lintas-dibadung-dilakukan-oleh-pelajar>
- Hadianto, Zen. (2014). *Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*. [Online]. Diakses dari <http://zenhadianto.blogspot.com>.